

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketika reformasi bergelora di Indonesia, segenap komponen bangsa terpacu untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kerja dan upaya-upaya lainnya ke arah kemajuan. Semangat itu pula yang memberikan dorongan betapa pentingnya melakukan upaya-upaya sistematis untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan guna mewujudkan masyarakat madani yang dicita-citakan.

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. *Output* dan *outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik *output* maupun *outcome*.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya.

Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui *cost efficiency* dan *cost effectiveness* anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

Wujud akuntabilitas pemerintah yang digunakan adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dan teknis penyusunannya diterapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Ruang Lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada semua aspek kegiatan, umumnya meliputi aspek managerial, teknis dan

keuangan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan Keputusan Kepala LAN tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana kinerja penetapan kinerja, serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (*Good Governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012, maka Bupati/Walikota berkewajiban menyusun LAKIP Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012, serta menyampaikannya kepada

Presiden RI melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat, keterbukaan, profesionalitas dan akuntabilitas. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pacitan.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan bahwa visi misi dan tujuan stratejik dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 kepada seluruh *stakeholders*.

Adapun tujuannya adalah :

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan selama Tahun Anggaran 2011;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun 2011, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan di masa yang akan datang;
- c. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Pemerintah Kabupaten Pacitan sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- h. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- k. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- l. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 23 Nopember 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012.
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016

D. Gambaran Umum Kabupaten Pacitan

D.1. Geografis, Topografi dan Hidrografi

Pacitan merupakan salah satu dari 38 Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Timur yang berada di bagian Barat Daya Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Pacitan terletak di antara 07° 55' - 08° 17' Lintang Selatan 110° dan 55' - 111° 25' Bujur Timur, dengan luas wilayah 1.389,8716 Km² atau 138.987,16 Ha. yang sebagian besar berupa bukit, gunung, dan jurang terjal.

Batas wilayah Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah).
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek

Secara administratif, Kabupaten Pacitan terbagi atas 12 Kecamatan, 5 Kelurahan, 166 Desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tulakan, yaitu 161,61 Km² dan Kecamatan Tegalombo seluas 149,25 Km². Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Sudimoro, yaitu luas 71,86 Km².

Topografis Kabupaten Pacitan terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Kondisi tersebut membawa konsekuensi munculnya keberagaman perilaku masyarakat terutama perbedaan mata pencaharian. Kondisi topografi itu dapat dirinci sebagai berikut :

- a) Datar (kelas kelerengan 0-5%) dengan luas 55,59 Km² atau 4 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- b) Berombak (kelas kelerengan 6-10%) dengan luas 138,99 Km² atau 10 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- c) Bergelombang (kelas kelerengan 11-30%) dengan luas 333,57 Km² atau 24 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- d) Berbukit (kelas kelerengan 31-50%) dengan luas 722,73 Km² atau 52 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- e) Bergunung (kelas kelerengan > 52%) dengan luas 138,99 Km² atau 10 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan.

Curah hujan tahunan di Kabupaten Pacitan paling tinggi jatuh pada bulan Januari dan Desember dengan rata-rata curah hujan sebesar 581 mm³, suhu udara berkisar antara 22,6°C sampai dengan 32,1° C, dengan kelembaban udara tahunan rata-rata 77%.

Tata guna lahan merupakan gambaran tentang penggunaan ruang wilayah dan aktivitas masyarakat. Sesuai dengan peruntukannya tata guna lahan di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

- Tanah ladang : 21,51 % atau 29.890,58 ha.
- Pemukiman Penduduk : 02,27 % atau 3.153,33 ha.

- Hutan : 58,56 % atau 81.397 ha.
- Sawah : 09,36 % atau 13.015,26 ha.
- Pesisir dan tanah kosong : 08,29 % atau 11.530,99 ha.

Hal lain yang juga perlu disampaikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu :

- Data informasi luas wilayah

Kabupaten Pacitan memiliki luas wilayah 1.389,8716 Km² atau 138.987,16 Ha, secara rinci luas wilayah menurut kecamatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
Luas Daerah Kabupaten Pacitan per Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Donorojo	109,09
2	Punung	108,81
3	Pringkuku	132,93
4	Pacitan	77,11
5	Kebonagung	124,85
6	Arjosari	117,06
7	Nawangan	124,06
8	Bandar	117,34
9	Tegalombo	149,26
10	Tulakan	161,62
11	Ngadirojo	95,91
12	Sudimoro	71,86
Total		1.389,87

Sumber : Buku Pacitan Dalam Angka 2011

➤ Jumlah bangunan rumah (tempat tinggal)

Bangunan rumah (tempat tinggal) yang ada di Kabupaten sampai dengan akhir tahun 2011 secara rinci dapat disampaikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah bangunan rumah (tempat tinggal) yang ada di Kabupaten Pacitan per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Rumah
1	Donorojo	9.033
2	Punung	10.527
3	Pringkuku	8.716
4	Pacitan	17.259
5	Kebonagung	12.405
6	Arjosari	11.202
7	Nawangan	11.442
8	Bandar	10.679
9	Tegalombo	11.183
10	Tulakan	9.774
11	Ngadirojo	13.013
12	Sudimoro	8.333
Total		133.566

Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan

D.2. Demografi

Berdasarkan data penduduk dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, jumlah penduduk Kabupaten Pacitan pada akhir tahun 2011 sebesar 542.417 jiwa. Sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 540.881 jiwa. Sehingga mengalami kenaikan sebesar 0,28%. Menurut jenis kelamin jumlah penduduk Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 terdiri dari 264.848 jiwa laki - laki dan 277.569 jiwa perempuan, dengan kepadatan penduduk sebesar 390 jiwa/ Km².

Selanjutnya untuk jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan
Jenis Kelamin Tahun 2010-2011

Usia (tahun)	Tahun 2010			Tahun 2011 *)		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
0 – 4	18.774	17.696	36.470	18.826	17.747	36.573
5 – 9	20.186	18.951	39.137	20.242	19.006	39.248
10 – 14	22.895	21.327	44.222	22.958	21.376	44.334
15 – 19	19.915	18.144	38.059	19.970	18.198	38.168
20 – 24	16.088	16.942	33.030	16.133	16.992	33.125
25 – 29	17.799	18.921	36.720	17.849	18.979	36.828
30 – 34	16.002	17.128	33.130	16.047	17.177	33.224
35 – 39	19.569	21.358	40.927	19.623	21.423	41.046
40 – 44	21.230	22.531	43.761	21.289	22.598	43.887
45 – 49	20.170	21.345	41.515	20.226	21.408	41.634
50 – 54	17.918	18.892	36.810	17.969	18.947	36.916
55 – 59	15.394	14.460	29.854	15.437	14.502	29.939
60 – 64	10.972	12.732	23.704	11.003	12.768	23.771
65 ke atas	27.200	36.342	63.542	27.276	36.448	63.724
Jumlah	27.200	276.342	540.881	264.848	277.569	542.417

Sumber : - Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan
- *) Angka Sementara

Tabel 1.4
Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2011

No	LAPANGAN USAHA	Tahun 2010			Tahun 2011 *)		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah *)
1	Pertanian	115.199	91.110	206.309	112.922	69.960	182.882
2	Pertambangan dan Penggalian	2.132	620	2.752	1.632	1.494	3.126
3	Industri	15.774	31.058	46.832	7.139	18.315	25.454
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0	0	0	0	0	0
5	Konstruksi	10.954	239	11.193	11.484	302	11.786
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	16.376	25.065	41.441	17.347	13.382	30.729
7	Angkutan dan Telekomunikasi	5.492	1.139	6.631	3.407	0	3.407
8	Bank, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.252	968	2.220	2.633	302	2.935
9	Jasa – jasa	17.429	12.499	29.928	12.094	10.313	22.407
Jumlah		184.608	162.698	347.306	168.658	114.068	282.726

Sumber : - Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan
- *) Angka sementara

D.3. Sosial Budaya

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / *Human Development Index (HDI)* adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu indeks komposit yang diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia sehingga dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu suatu ukuran tunggal dan sederhana yang memuat tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan, yang

menurut UNDP dapat menunjukkan tingkat pembangunan manusia suatu wilayah melalui pengukuran keadaan penduduk yang sehat dan berumur panjang, berpendidikan dan berketrampilan, serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk dapat hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 berdasarkan angka sementara dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan adalah sebesar 72,6

a. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan penting bagi suatu bangsa dan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Karena itu pendidikan merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas utama dalam pembangunan nasional. Hal ini disadari karena pendidikan dipandang sebagai unsur utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fokus peningkatan pembangunan SDM saat ini adalah pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk untuk mengecap pendidikan terutama penduduk usia sekolah (5-24 tahun). Berdasarkan data dalam Pacitan Dalam Angka Tahun 2011 jumlah penduduk Kab. Pacitan yang menamatkan pendidikan tingkat SD sebesar 205.473 orang, tamat tingkat SLTP sebesar 90.163 orang, tamat tingkat SLTA sebesar 46.525 orang, tamat SLTA kejuruan sebesar 7.245 orang, tamat tingkat

D1/D2 sebanyak 3.559 orang, tamat D3/Akademi sebanyak 1.994 orang dan tamat universitas sebanyak 10.582 orang. Apabila dilihat dari jumlah murid pada tahun ajaran 2010 masing-masing tercatat di tingkat SD sebanyak 54.653, di tingkat SMP sebanyak 9.836, di tingkat SMA sebanyak 13.564 siswa. Jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Pacitan hingga tahun 2011 meliputi sekolah setingkat SD/ sederajat 523 buah, SLTP/ Sederajat 106 buah, SLTA/ sederajat 43 buah.

Tabel 1.5
Data Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2010-2011

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun 2010	Tahun 2011
1	Tidak/ Belum Sekolah	47.050	64.760
2	Tidak/ BelumTamat SD	109.307	73.840
3	Tamat SD	178.850	205.473
4	Tamat SLTP	93.525	90.163
5	Tamat SLTA	33.366	46.525
6	Tamat SLTA Kejuruan	26.935	7.245
7	Tamat D1/D2	3.057	3.559
8	Tamat D3/ Akademi	1.232	1.994
9	Tamat Universitas	9.171	10.582
Jumlah		502.493	504.411

Sumber : - Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan
- *) Angka Sementara

b. Kesehatan

Bidang kesehatan merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu pemerintahan karena mendukung kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia sebagai salah satu modal pembangunan. Jaminan kesehatan yang semakin baik akan menghasilkan kualitas manusia yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas. Saat ini banyak program kesehatan yang lebih diprioritaskan pada calon generasi

penerus yaitu calon bayi dan balita. Upaya-upaya di bidang kesehatan dapat dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swasta. Pemerintah dan swasta dalam memberikan upaya-upaya pelayanan kepada masyarakat dengan penyediaan fasilitas kesehatan. Ketersediaan sarana dan prasarana fisik beserta tenaga medis yang profesional akan dapat menunjang peningkatan derajat kesehatan penduduk.

Salah satu indikator yang menjadi ukuran adalah indeks harapan hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 sebesar 71,55 tahun, sedangkan Angka angka harapan hidup Propinsi Jawa Timur yaitu sebesar 65 tahun . Angka harapan hidup ini diharapkan dapat mencerminkan tingkat/derajat kesehatan penduduk, karena apabila seseorang mempunyai derajat kesehatan yang baik maka ia mempunyai harapan hidup yang lebih panjang dibandingkan orang yang derajat kesehatannya buruk.

Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Pacitan terdiri dari 1 unit Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan kapasitas 104 tempat tidur, 24 unit puskesmas, 55 unit puskesmas pembantu, 37 unit puskesmas keliling, 61 praktek dokter, 9 balai pengobatan dan 797 unit posyandu. Jumlah tenaga kesehatan non RSUD Pacitan sampai dengan tahun 2011 terlihat seperti pada tabel berikut.

Tabel I.6.
Jumlah Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan
Kabupaten Pacitan Tahun 2011

NO	TENAGA KESEHATAN	JUMLAH
1	2	3
1	Tenaga Medis	48
2	Perawat	171

3	Bidan Puskesmas	43
4	Bidan Desa	123
5	Non Paramedis	276
6	Tenaga Kesehatan Lainnya	165
Jumlah		826

Sumber: Pacitan Dalam Angka Tahun 2011

Sedangkan jumlah tenaga di RSUD Pacitan dengan statusnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sampai dengan tahun 2011 sejumlah 443 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I.7.
Jumlah Tenaga Kesehatan di RSUD Kabupaten Pacitan Tahun 2011

NO	JENIS TENAGA	JUMLAH TENAGA			
		PNS	CPNS	THL	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Dokter Umum	32	0	0	32
2	Dokter Spesialis	7	0	0	7
3	Dokter Gigi	6	0	0	6
4	Perawat	101	0	32	133
5	Bidan	25	0	4	29
6	Perawat gigi	2	0	0	2
6	Non Perawatan	86	0	12	98
Jumlah		259	0	48	307

Sumber: RSUD Pacitan Tahun 2011

Tabel I.8.
Jumlah Tenaga Non Kesehatan di RSUD Kabupaten Pacitan Tahun 2011

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH TENAGA			
		PNS	CPNS	THL	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Magister	4	0	0	4
2	Sarjana	17	0	4	21
3	D3	6	0	3	9
4	D2	1	0	0	1
5	D1	1	0	0	1
6	SMA	56	0	27	83
7	SMP	9	0	0	9
8	SD	2	0	4	6
Jumlah		96	0	38	134

Sumber: RSUD Pacitan Tahun 2011

RSUD Pacitan sesuai dengan statusnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mempunyai kewenangan untuk merekrut tenaga BLUD dalam bentuk Tenaga Harian Lepas (THL).

c. Agama

Pembangunan sektor agama merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas manusia yang beriman dan bertaqwa, karena agama mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan. Pembinaan kehidupan keagamaan perlu terus ditingkatkan melalui dakwah dan bimbingan agama agar masyarakat memperoleh pemahaman agama dengan baik sekaligus dapat mengamalkannya dengan benar. Jumlah tempat peribadatan di Kabupaten Pacitan pada tahun 2005-2009 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I.9.

Jumlah Tempat Peribadatan Kabupaten Pacitan Tahun 2010

No	Sarana Ibadah	Jumlah Tempat Peribadatan
1	2	3
1	Masjid	1.556
2	Langgar	1.051
3	Musholla	805
4	Gereja	7
5	Pura	-
6	Vihara	-

Sumber: Pacitan Dalam Angka Tahun 2011

D.4. Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Potensi yang ada di wilayah Kabupaten Pacitan secara umum dari berbagai komoditi 2011 sebagai berikut :

1. Pertanian, meliputi komoditi ubi kayu, jagung, padi, kacang tanah, ubi jalar, pisang, jeruk siam / keprok;
2. Tanaman perkebunan, meliputi komoditi kelapa, cengkeh, kopi, kakao, lada, panili, melinjo, jahe, kunyit, laos, temu lawak, kencur, janggolan, aren, kapas, jarak pagar, nilam;
3. Ternak meliputi sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam buras, ayam broiler, ayam ras petelur dan itik/entok;
4. Kehutanan meliputi jati, mahoni, sengon laut, akasia, pinus, sono dan bambu;
5. Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.10
Potensi Tambang di Kabupaten Pacitan
Tahun 2011 berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009

NO	BAHAN GALIAN	LOKASI	SUMBER DAYA/ CADANGAN	KEGUNAAN
BATUBARA				
1.	Batubara	Tulakan (Desa Jatigunung, Desa Gasang, Desa Kalikuning), Kebonagung (Desa Ketepung), Punung (Desa Mendolo Kidul)	Sumberdaya Tertunjuk = 78.066,52 ton	Energi (bahan bakar non migas), kimia
MINERAL LOGAM				
1.	TIMAH PUTIH	Ngadirejo (Desa Tanjung Lor)	Perlu penelitian lebih lanjut	Solder, elektronik,

NO	BAHAN GALIAN	LOKASI	SUMBER DAYA/ CADANGAN	KEGUNAAN
				campuran logam
2.	NIKEL	Ngadirojo (Desa Pagerejo)	Perlu penelitian lebih lanjut	Campuran logam tahan karat dan tahan tekanan tinggi
3.	TIMAH HITAM	Ngadirojo (Gn. Tileng), Tulakan (Desa Kluwih)	Potensi dan Kualitas perlu penelitian lebih detail	Aki, pelindung radiasi, cat, peluru
4.	MANGAAN	Tegalombo (Pongangan-Pojok, Desa Kemuning, Desa Tahunan), Nawangan (Desa Mujing), Bandar (Desa Kledung, Desa Kemuning)	Pongangan (Mn 6,04 – 10,2 %) Kledung (Mn 47,4 – 52,6 %)	Campuran dalam proses pembuatan baja
5.	TEMBAGA	Pacitan, Tagalombo	Potensi dan Kualitas perlu penelitian lebih detail	Alat-alat elektronik
6.	SENG	Ngadirojo	Potensi dan Kualitas perlu penelitian lebih detail	Penahan korosi, bahan bangunan
7.	EMAS	Ngadirojo, Tegalombo, Punung, Arjosari, Pringkuku, Nawangan, Tulakan, Bandar (Gn. Gembes)	Potensi dan Kualitas perlu penelitian lebih detail Gn. Gembes tonase batu 2.880.000 ton dengan kadar Au rata-rata 0,39 ppm	Peralatan tahan karat, perhiasan
8.	PASIR BESI	Ngadirojo (Pantai Pucung Desa Sidomulyo) Donorojo (Pantai Ngriboyo Desa Sendang)	Cad tertunjuk 2.440,32 m ³ (luas = 2,847 Ha); Kadar Fe = 45,9% Cad tertunjuk 7.325,64 m ³ (luas = 11,02 Ha); Kadar Fe = 41,9%	Bahan dasar pembuatan logam
9.	BATU BESI	Kebonagung (Desa Plumbungan, Pacitan (Desa Kembang), Tegalombo (Desa	Potensi dan Kualitas perlu penelitian lebih detail	Industri berat, peralatan logam, baja, otomotif

NO	BAHAN GALIAN	LOKASI	SUMBER DAYA/ CADANGAN	KEGUNAAN
		Kasihani)		
MINERAL BUKAN LOGAM				
1.	BATU GAMPING	Tulakan, Donorojo, Punung, Ngadirojo, Pacitan	Sumberdaya tereka = 4.055.055.829 ton (luas 7.372, 62 Ha)	Semen, kapur pertanian, pengeras logam, gelas
2.	DOLOMIT	Pringkuku	Sumberdaya tereka = 16.000.000 m ³	Kertas, baja, pembuatan gas karbondioksida
3.	GYP SUM	Tagalombo, Nawangan	Perlu penelitian lebih lanjut	Pupuk, semen, farmasi dan kedokteran
4.	BENTONIT	Donorojo, Punung, Tulakan, Pringkuku, Tegalombo	Sumberdaya tereka = 70.000.000 m ³	Penjernih minyak goreng, lumpur pemboran, industri refraktori
5.	KALSIT	Pacitan, Pringkuku, Punung, Tulakan, Donorojo	Sumberdaya tereka = 1.220.175 ton	Karet, cat, bahan dempul, campuran adonan keramik
6.	ZEOLIT	Bandar (Desa Bangunsari), Pringkuku (Desa Tamansari)	Sumberdaya tereka = 1.020.510 ton (luas 59.100 Ha)	Batu hias, pelapis dinding
7.	OKER	Tegalombo, Bandar	Perlu penelitian lebih lanjut	Bahan warna cat, tinta, karet dan kertas
8.	PHOSFAT	Donorojo, Pringkuku, Ngadirojo	Perlu penelitian lebih lanjut	Bahan pupuk alam dan pupuk buatan
9.	FELD SPAR	Tulakan, Arjosari, Punung, Sudimoro, Pacitan	Sumberdaya tereka = 119.600.000 ton (luas 9.500 Ha)	Kaca, gelas, isolator, industri batu hias
10.	KAOLIN	Bandar, Punung, Tagalombo, Pringkuku, Arjosari	Sumberdaya tereka = 9.000.000 m ³	Keramik, cat, kertas, sabun, pestisida
11.	PASIR KUARSA	Tegalombo, Ngadirojo, Donorojo, Pacitan	Perlu penelitian lebih lanjut	Semen, keramik, kaca, gelas
12.	TOSEKI	Arjosari, Nawangan	Perlu penelitian lebih lanjut	Bahan keramik halus, porselen
13.	PIROPHY LIT	Arjosari, Nawangan	Sumberdaya tereka = 4.800.000 ton	Bahan tahan api, keramik, campuran

NO	BAHAN GALIAN	LOKASI	SUMBER DAYA/ CADANGAN	KEGUNAAN
			(luas 29 Ha)	kosmetik
14.	FOSIL KAYU	Sepanjang alur sungai	Perlu penelitian lebih lanjut	Batu hias tanaman, kerajinan, perhiasan
15.	KALSEDON / AGATE	Sepanjang alur sungai	Perlu penelitian lebih lanjut	Kerajinan tangan, batu perhiasan
16.	KRISTAL KUARSA	Nawangan	Perlu penelitian lebih lanjut	Batu perhiasan
17.	RIJANG	Punung, Ngadirojo	Perlu penelitian lebih lanjut	Batu hias, perhiasan
18.	JASPER	Donorojo, Tegalombo, Pacitan	Perlu penelitian lebih lanjut	Perhiasan
BATUAN				
1.	BALLCLAY	Punung, Kebonagung, Tegalombo, Tulakan, Ngadirojo	Perlu penelitian lebih lanjut	Keramik halus dan porselen
2.	MARMER	Tulakan, Kebonagung, Sudimoro	Sumberdaya tereka = 77.000.000 m ³ (luas 300 Ha)	Kaca, gelas, isolator, industri batu hias
3.	SIRTU	Sungai Grindulu, Sungai Brongkah, Sungai Pacitan, Sungai Lorok, Sungai Watugaleng, Sungai Tumpuk	Sumberdaya di sepanjang sungai	Bahan bangunan
4.	BATUAN BEKU	Nawangan, Ngadirojo, Pacitan, Tulakan	Sumberdaya tereka = 10.000.000 m ³	Bahan bangunan, ornamen, batu hias
5.	TRASS	Tulakan, Kebonagung	Perlu penelitian lebih lanjut	Semen, batako, tanah urug
6.	LEMPUNG/T ANAH LIAT	Tegalombo, Tulakan, Pacitan, Kebonagung	Perlu penelitian lebih lanjut	Industri bata, bahan peralatan tahan api

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan

6. Pariwisata

Kabupaten Pacitan merupakan kabupaten yang memiliki cukup banyak obyek wisata sehingga pariwisata menjadi salah satu andalan, karena terdapat sekitar 41 obyek wisata yang

tersebar di wilayah ini. Obyek andalan pariwisata di Kabupaten Pacitan adalah pantai dan gua. Sampai tahun 2011 ada 19 obyek wisata yaitu Pantai Teleng Ria, Pantai Tamperan, Pantai Srau, Pantai Watu Karung, Pantai Klayar, Pantai Segoro Anakan, Pantai Taman, Pemandian Air Hangat, Goa Gong, Goa Tabuhan, Goa Kalak, Goa Putri, Pantai Dhaki, Pantai Buyutan, Pantai Pancer Door dan Monumen Tumpak Rinjing dan Monumen Perjuangan Jendral Sudirman. Serta ada 2 obyek khusus untuk ekspedisi yaitu Luweng Jaran dan Luweng Ombo. Salah satu penunjang sektor pariwisata ini adalah hotel. Terdapat sekitar 17 hotel dengan 277 kamar dan 469 tempat tidur. Jumlah kunjungan wisata pada tahun 2011 sebanyak 598.690 orang dengan kontribusi terhadap PAD dari sektor pariwisata sebesar Rp. 1.937.184.100,00

Tabel 1.11
Potensi Pariwisata di Kabupaten Pacitan
Tahun 2011

No.	Jenis Wisata	Lokasi		Jarak dari Pusat Kota
1.	Wisata Pantai	Pantai Teleng Ria	Kel. Sidoharjo, Kec. Pacitan	3 Km
		Pantai Watukarung	Desa Watukarung, Kec. Pringkuku	25 Km
		Pantai Segara Anakan	Desa Sidomulyo, Kec. Ngadirojo	30 Km
		Pantai Tamperan	Kel. Sidoharjo, Kec. Pacitan	3 Km
		Pantai Srau	Desa candi, Kec. Pringkuku	25 Km
		Pantai Taman	Desa Sidomulyo, Kec. Ngadirojo	32 Km
		Pantai Wawaran	Desa Sidomulyo, Kec. Kebonagung	15 Km
		Pantai Klayar	Desa Widoro, Kec. Donorojo	53 Km

No.	Jenis Wisata	Lokasi		Jarak dari Pusat Kota
		Pantai Dhaki	Desa Sukorejo, Kec. Sudimoro	48 Km
		Pantai Buyutan	Desa Widoro, Kec. Donorojo	45 Km
		Pantai Pancer Door	Kel. Ploso, Kec. Pacitan	3 Km
		Pantai Kali Wuluh	Desa Klesem, Kec. Keboangung	20 Km
2.	Wisata Goa	Goa Tabuhan	Desa Wareng, Kec. Punung	40 Km
		Goa Gong	Desa Bomo, Kec. Punung	30 Km
		Goa Putri	Desa Kendal, Kec. Punung	29 Km
3.	Wisata Sejarah / Budaya	Monumen Panglima Besar Jendral Soedirman	Desa Pakis Baru, Kec. Nawangan	50 Km
		Monumen Tumpak Rinjing	Desa Dadapan, Kec. Pringkuku	12 Km
4.	Wisata Rekreasi	Pemandian Air Hangat	Desa Karangrejo, Kec. Arjosari	15 Km

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan

7. Kelautan dan Perikanan

Potensi perikanan di Kabupaten Pacitan di dominasi oleh perikanan laut, hal ini dikarenakan 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Pacitan berada di pesisir laut selatan dengan panjang pantai kurang lebih 70,709 km. Ketujuh kecamatan tersebut antara lain: Kecamatan Pacitan, Kebonagung, Tulakan, Ngadirojo, Sudimoro, Pringkuku, dan Donorojo

Tabel 1.12
Hasil Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pacitan
Tahun 2011

No	Uraian	Lokasi
1.	Tuna	7 Kecamatan
2.	Cakalang	7 Kecamatan

No	Uraian	Lokasi
3.	Tongkol	7 Kecamatan
4.	Layur	7 Kecamatan
5.	Manyung	7 Kecamatan
6.	Lemuru	7 Kecamatan
7.	Tengiri	7 Kecamatan
8.	Rebon	7 Kecamatan
9.	Cucut	7 Kecamatan
10.	Pari	7 Kecamatan
11.	Kembung	7 Kecamatan
12.	Tiga waja	7 Kecamatan
13.	Teri	7 Kecamatan
14.	Kakap Merah	7 Kecamatan
15.	Kuwe	7 Kecamatan
16.	Pisang-pisang	7 Kecamatan
17.	Julung-julung	7 Kecamatan
18.	Marlin	7 Kecamatan
19.	Sebelah	7 Kecamatan
20.	Bawal Hitam	7 Kecamatan
21.	Layang	7 Kecamatan
22.	Cucut Martil	7 Kecamatan
23.	Bawal putih	7 Kecamatan
24.	Lemadang	7 Kecamatan
25.	Kuniran	7 Kecamatan
26.	Golok-golok	7 Kecamatan
27.	Tuna	7 Kecamatan
28.	Cakalang	7 Kecamatan
29.	Lobster	7 Kecamatan
30.	Lele	12 Kecamatan
31.	Nila	12 Kecamatan

8. Perdagangan

Dalam aspek perdagangan didukung melalui ketersediaan Pasar Daerah, adapun jumlah pasar daerah sampai dengan tahun 2011 sejumlah 18 buah dengan rincian di masing – masing kecamatan sebagai berikut : Donorojo 1 buah, Punung 2 buah, Pringkuku 1 buah, Pacitan 4 buah, Arjosari 1 buah, Nawangan 1 buah, Bandar 2 buah, Tegalombo 1 buah, Tulakan 2 buah, Ngadirojo 2 buah dan Sudimoro 1 buah

9. Perindustrian

Berdasarkan jenis produksinya Industri kecil yang dominan di Kabupaten Pacitan adalah industri gula merah, batu akik, batik tulis, keramik/gerabah seni, batu mulia, anyaman bambu, dan industri kecil yang bergerak di bidang makanan, serta industri kecil lainnya

Tabel 1.13
Potensi Perindustrian di Kabupaten Pacitan Tahun 2011

No.	Uraian	Lokasi
1.	Batu Aji/Akik	Donorojo, Punung
2.	Gula merah	Kebonagung, Donorojo, Tulakan
3.	Keramik dan Gerabah Seni	Kebonagung
4.	Batik Tulis	Ngadirojo, Pacitan
5.	Batu Bata	Kebonagung, Pacitan
6.	Kapur Tohor	Kebonagung
7.	Industri Makanan Olahan	Pacitan, Ngadirojo, Tulakan, Arjosari, Tegalombo Pringkuku, Punung
8.	Meubelair	Kec. Pacitan
9.	Anyaman bambu	Kec. Nawangan, Arjosari

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat ditunjukkan dari indikator makro sosial ekonomi. Adapun capaian kinerja pembangunan ekonomi berdasarkan indikator makro ekonomi daerah pada tahun 2010-2011 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.14
Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2010 - 2011

NO	URAIAN	Tahun	
		2010	2011*)
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,53	6,64
2.	PDRB ADHB (juta Rp.)	3.353.210,13	3.738.458,5
3.	PDRB ADHK (juta Rp.)	1.548.222,77	1.648.832,8
4.	Penduduk Miskin (%)	19,5**)	17,37
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	0,87	2,7
6.	Laju Inflasi (dari harga konsumen) (%)	7,11	4,34
7.	Jumlah Penduduk pertengahan tahun (jiwa)	540.881	542.417
8.	Pendapatan per kapita (rupiah)	6.199.533,96	6.893.144,0
9.	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)	71,26	71,55
10.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	6,90	6,91
11.	Angka Melek Huruf P15 Tahun + (%)	91,58	91,71
12.	Pengeluaran Perkapita Riil Disesuaikan (Rp.000)	635,49	635,97
13.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,07	72,6

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan

*) = Angka Sementara

***) = Angka Hasil Susenas Tahun 2010

➤ **Pertumbuhan ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan besarnya tingkat kenaikan nilai PDRB ADHK. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010 yaitu pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,64% sedangkan tahun 2010 mencapai 6,53 %. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan perekonomian seiring dengan meningkatnya stabilitas ekonomi dan peran masing-masing sektor dalam pertumbuhan ekonomi.

➤ **PDRB ADHK**

PDRB ADHK merupakan pertumbuhan riil yang tidak terpengaruh oleh kenaikan harga atau inflasi. PDRB ADHK tahun 2011 sebesar Rp.1.648.803,97 meningkat sebesar 4,96% bila dibanding tahun 2010 sebesar Rp. 1.548.222,77 adapun perkembangan PDRB ADHK tahun 2010-2011 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.15
PDRB ADHK Kabupaten Pacitan
Tahun 2010 - 2011 (dalam juta)

No	Lapangan Usaha	Tahun 2010	%	Tahun 2011*)	%
1.	Pertanian	613.885,63	39,65	633.032,78	38,39
2.	Pertambangan Dan Penggalian	65.877,32	4,26	72.194,95	4,38
3.	Industri Pengolahan	54.082,53	3,49	57.562,18	3,49
4.	Listrik, Gas Dan Air Bersih	14.982,19	0,97	16.385,72	0,99
5.	Bangunan/ Konstruksi	131.713,77	8,51	146.333,99	8,88
6.	Perdagangan, Hotel Dan Restoran	184.700,54	11,93	207.326,85	12,57

7.	Angkutan Dan Komunikasi	79.762,08	5,15	87.299,38	5,29
8.	Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan	141.575,72	9,14	151.749,38	9,20
9.	Jasa – Jasa	261.642,99	16,90	276.918,73	16,80
	PDRB	1.548.222,77	100,00	1.648.803,97	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan

*) Angka Sementara

Berdasarkan tabel tersebut nampak bahwa, PDRB ADHK Kabupaten Pacitan didominasi dari sektor pertanian yang mencapai 38,39%; Jasa – Jasa 16,80%; Perdagangan, Hotel dan Restoran 12,57%; Bangunan/ Konstruksi 8,88%; Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan 9,20%; Angkutan dan Komunikasi 5,29%; Pertambangan dan Penggalan 4,38%; Industri Pengolahan 3,49% dan Listrik, Gas dan Air Bersih 0,99%.

➤ **PDRB ADHB**

PDRB ADHB merupakan salah satu indikator ekonomi yang memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah tertentu. Adapun capaian PDRB ADHB masing masing sektor di Kabupaten Pacitan Tahun 2010-2011 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.16
PDRB ADHB Kabupaten Pacitan
Tahun 2010 - 2011 (dalam juta)

No	Lapangan Usaha	Tahun 2010	%	Tahun 2011*)	%
1.	Pertanian	1.275.568,25	38,05	1.374.234,89	36,75
2.	Pertambangan Dan Penggalan	111.683,59	3,33	124.560,42	3,33
3.	Industri Pengolahan	128.094,51	3,82	146.485,33	3,92

4.	Listrik, Gas Dan Air Bersih	37.522,95	1,12	42.315,95	1,13
5.	Bangunan/ Konstruksi	274.194,69	8,18	333.661,57	8,92
6.	Perdagangan, Hotel Dan Restoran	413.804,90	12,34	241.073,93	13,13
7.	Angkutan Dan Komunikasi	220.533,67	6,58	296.615,03	6,43
8.	Kuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan	263.552,52	7,84	296.615,03	7,93
9.	Jasa – Jasa	628.255,05	18,74	688.739,19	18,42
	PDRB	3.353.210,13	100	3.739.670,61	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan

*) Angka Sementara

Berdasarkan tabel tersebut nampak bahwa, PDRB ADHB Kabupaten Pacitan didominasi dari sektor pertanian yang mencapai 36,75%; Jasa – Jasa 18,42%; Perdagangan, Hotel dan Restoran 13,13%; Bangunan/ Konstruksi 8,92%; Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan 7,93%; Angkutan dan Komunikasi 6,43%; Pertambangan dan Penggalan 3,33%; Industri Pengolahan 3,92% dan Listrik, Gas dan Air Bersih 1,13%.

Tabel 1.17
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pacitan
Tahun 2009, 2010, dan 2011

No	Tahun	PDRB Perkapita (Rp)		Pertumbuhan (%)	
		Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan
1.	2009	2.933.425,66	1.453.319,02	111,46	108,01
2.	2010	3.353.210,13	1.548.222,77	114,31	106,53
3.	2011*)	3.739.670,61	1.648.803,97	111,53	106,50

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan

*) = Angka Sementara

E. Struktur Organisasi

Diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah baik propinsi, kabupaten dan kota untuk menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerahnya sesuai kebutuhan. Dengan kewenangan tersebut, diperlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang luas dari pelaku di bidang kelembagaan pemerintah daerah.

Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan meliputi Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah. Pada bulan Desember 2007 telah ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pacitan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Daerah tersebut sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan

E.1. Sekretariat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Asisten terdiri dari :
 - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - Asisten Administrasi Umum
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

E.1.1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:

- a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
- b. Bagian Kerjasama dan Perbatasan;
- c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
- d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

E.1.2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:

- a. Bagian Administrasi Pembangunan;
- b. Bagian Administrasi Perekonomian;
- c. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam;
- d. Bagian Pengolah Data Elektronik.

E.1.3. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

- a. Bagian Hukum;
- b. Bagian Organisasi;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Umum.

E.2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.

E.3. Dinas Daerah

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibentuk Dinas Daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011. Pemerintah Kabupaten Pacitan terdiri dari 14 Dinas Daerah yaitu:

- 1) Dinas Pendidikan;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- 4) Dinas Bina Marga dan Pengairan;
- 5) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
- 6) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- 7) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 9) Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan;
- 10) Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- 11) Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 12) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- 13) Dinas Pertambangan dan Energi;
- 14) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

E.4. Lembaga Teknis Daerah

Sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten dibentuk lembaga teknis daerah. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kabupaten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan/Kantor.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, ada 14 lembaga teknis daerah yaitu :

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
- 2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- 3) Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
- 4) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- 5) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- 6) Badan Kepegawaian Daerah;
- 7) Inspektorat;
- 8) Rumah Sakit Umum Daerah;
- 9) Kantor Pendidikan dan Pelatihan;
- 10) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- 11) Kantor Lingkungan Hidup;
- 12) Kantor Ketahanan Pangan;
- 13) Kantor Pelayanan Perizinan;
- 14) Satuan Polisi Pamong Praja.

Pada bulan Desember 2010 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan.

Sehingga secara keseluruhan terdapat 15 lembaga teknis daerah, 14 dinas daerah dan 2 sekretariat sehingga total ada 31 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pacitan.

E.5. Kecamatan

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah dalam wilayah kecamatan. Di Kabupaten Pacitan memiliki 12 kecamatan, yaitu :

- | | |
|---------------|----------------|
| 1) Pacitan, | 7) Punung, |
| 2) Arjosari, | 8) Donorojo, |
| 3) Tegalombo, | 9) Kebonagung, |
| 4) Nawangan, | 10) Tulakan, |
| 5) Bandar, | 11) Ngadirojo, |
| 6) Pringkuku, | 12) Sudimoro. |

E.6. Kelurahan

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan, tugas pokok dan fungsi kelurahan adalah membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kelurahan. Di Kabupaten Pacitan terdapat 5 (lima) kelurahan yaitu :

- 1) Pacitan,
- 2) Pucangsewu,
- 3) Sidoharjo,
- 4) Ploso,
- 5) Baleharjo.

F. Sistematika LAKIP Tahun 2011

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan selama 5 tahun yaitu tahun 2011-2016. Capaian kinerja (*performance result*) tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Analisis atas capaian kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya faktor-faktor yang menyebabkan kinerja (*performance*) tidak tercapai ataupun kinerja yang berhasil melampaui target yang ditetapkan.

Sistematika penulisan yang dipakai dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Gambaran Umum Kabupaten Pacitan
- E. Struktur Organisasi
- F. Sistematika LAKIP Tahun 2011

BAB II : PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 2011

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan dan Sasaran
- D. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran
- E. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011
- F. Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Tahun 2011
- B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2011
- C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2011
- D. Permasalahan Dan Upaya Pemecahan Masalah

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN